

ABSTRAK

PENGARUH TATA KELOLA DAN ATRIBUT PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020–2024

Oleh:

Jesica Dara Tista¹

Yudi Partama Putra²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite manajemen risiko, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan publik, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 29 perusahaan sebagai sampel dengan total 145 data observasi selama lima tahun pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26, yang diawali dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komite manajemen risiko, frekuensi rapat dewan komisaris, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan publik dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Secara simultan, komite manajemen risiko, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan publik, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Kata Kunci: Komite Manajemen Risiko, Jumlah Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pengungkapan Risiko Perusahaan.

ABSTRACT

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM ATTRIBUTES ON CORPORATE RISK DISCLOSURE IN COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE DURING THE 2020–2024 PERIOD

Oleh:

Jesica Dara Tista¹

Yudi Partama Putra²

This study aims to examine the effect of the risk management committee, board of commissioners size, frequency of board of commissioners meetings, public ownership, leverage, and firm size on corporate risk disclosure in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from the companies' annual reports. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 29 companies as the research sample with a total of 145 observations over a five-year period. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26, preceded by descriptive statistical analysis, classical assumption tests, and hypothesis testing.

The results indicate that, partially, the risk management committee, the frequency of board of commissioners meetings, and leverage have no significant effect on corporate risk disclosure. In contrast, public ownership and firm size have a positive and significant effect on corporate risk disclosure, while board of commissioners size has a negative and significant effect on corporate risk disclosure. Simultaneously, the risk management committee, board of commissioners size, frequency of board of commissioners meetings, public ownership, leverage, and firm size have a significant effect on corporate risk disclosure in companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period.

Keywords: Risk Management Committee, Board of Commissioners Size, Frequency of Board of Commissioners Meetings, Public Ownership, Leverage, Firm Size, Corporate Risk Disclosure.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan meningkatnya aktivitas transaksi bisnis antar perusahaan menyebabkan tingkat dan kompleksitas risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi (Meirina & Dewi, 2021). Risiko dapat dipahami sebagai kondisi ketidakpastian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi di masa mendatang, di mana keputusan yang diambil pada saat ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang ada (Shagan, 2022). Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan di mana perusahaan menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko yang timbul, baik dari faktor internal dan faktor eksternal (Yuniar & Syafruddin, 2022). Berbagai risiko yang sering dihadapi perusahaan mendorong dewan komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen, khususnya dalam keterbukaan informasi dan pengungkapan risiko perusahaan (Krisna & Wijaya, 2022).

Peraturan terkait pengungkapan risiko tercantum dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 yang mengatur tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Aturan ini bertujuan memperbaiki dan memperkuat standar keterbukaan informasi dengan menegaskan kewajiban setiap perusahaan publik untuk menyajikan laporan tahunan secara transparan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (Salsabila & Hidayat, 2024). Risiko dapat digambarkan sebagai suatu bentuk ancaman terhadap kegiatan bisnis perusahaan.

Risiko biasanya dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diharapkan dan tidak dapat dihindari oleh perusahaan (Sudharto & Salim, 2021). Salah satu jenis informasi penting dalam pengungkapan non-keuangan adalah risiko perusahaan, yang mencerminkan potensi ketidakpastian yang dihadapi entitas dalam aktivitas usahanya, dikarenakan timbulnya kepercayaan investor pada perusahaan (Nustini & Nuraini, 2022).

Pengungkapan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yaitu langkah paling akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan (Yusrawati et al., 2024). Pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi keuangan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap keadaan keuangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut (Rizal et al., 2025). Pengungkapan risiko sangat berguna terhadap pengungkapan risiko perusahaan keputusan dalam menanamkan saham dan perusahaan yang memiliki profit besar dan salah satu cara perusahaan untuk profit kecil terhadap pengungkapan risiko berkomunikasi dengan para stakeholder. Dari pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi, khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi didalam perusahaan (Silitonga, 2021).

Menurut Darniaty & Murwaningsari (2020) pengungkapan risiko terdiri dari pengungkapan risiko wajib dan pengungkapan risiko sukarela. Pengungkapan risiko wajib merupakan pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi. Sedangkan pengungkapan risiko sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau

peraturan badan pengawas. Pengungkapan memberikan gambaran yang lebih baik tentang suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan (Diah & Suwarno 2023). Pengungkapan risiko perusahaan digunakan untuk mengurangi asimetri informasi akibat munculnya biaya keagenan, mengurangi persepsi risiko investor, dan biaya modal (Ekananda et al., 2025).

Teori keagenan merupakan jaringan hubungan kontraktual antara manajer (agent) dengan pemilik, kreditur dan pihak lain (principal). Agen diasumsikan sebagai individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Adnyana & Adwishanti, 2020). Teori keagenan dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan pengungkapan risiko. Jika manajer bertindak sebagai agent yang mempunyai pengetahuan tentang situasi perusahaan yang luas, maka ia dapat melaksanakan pengungkapan (Cindy et al., 2022). Manajer memberikan informasi mengenai risiko kepada pemegang saham dan kreditur dengan menyediakan informasi yang reliabel. Manajer merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki informasi mengenai risiko sedangkan pemegang saham dan kreditur sebagai pihak eksternal perusahaan yang biasanya tidak memiliki informasi mengenai risiko (Kurniawanto & Widarno, 2020).

Teori *Stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan para

stakeholder melalui penyampaian informasi yang transparan, akuntabel, dan relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan sehingga kebutuhan informasi *stakeholder* dapat terpenuhi (Shagan, 2022). Dalam perspektif teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang lengkap, termasuk informasi mengenai risiko perusahaan, agar *stakeholder* dapat memahami kondisi perusahaan dan mengambil keputusan secara tepat (Ramos & Cahyonowati, 2021).

Di Indonesia, perhatian terhadap pengungkapan risiko perusahaan semakin meningkat seiring penguatan regulasi tata kelola oleh otoritas jasa keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Ketentuan mengenai laporan tahunan emiten mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai risiko yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko perusahaan Indonesia masih rendah dan belum konsisten antar sektor industri. Banyak perusahaan hanya mengungkapkan informasi risiko secara deskriptif dan minimal, tanpa rincian kuantitatif mengenai dampak maupun strategi mitigasinya (Januarti et al., 2025). Hal ini praktik pengungkapan risiko masih bersifat *compliance-driven*, sekadar memenuhi kewajiban regulasi, bukan *value-driven* yang berorientasi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan investor perusahaan (Alamsyah & Irawati, 2023).

Pengungkapan risiko di Indonesia tergolong rendah. Permasalahan pengungkapan risiko yang rendah ini penting untuk dikaji. Oleh karena itu, praktik *good corporate governance* perlu diterapkan di dalam perusahaan agar terciptanya

pengungkapan risiko yang akan berdampak pada permasalahan keuangan perusahaan (Gustyana & Putri, 2022). Beberapa peneliti terdahulu tertarik untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang menjadi pendorong suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan pengungkapan risiko perusahaan. Banyak penelitian sebelumnya meneliti faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan risiko perusahaan. Perbedaan ini terdapat pada beberapa faktor diantaranya corporate governance (yang diproksikan oleh komite manajemen risiko, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan, dan proporsi kepemilikan publik), dan atribut perusahaan (yang diproksikan oleh leverage dan ukuran perusahaan).

Komite manajemen risiko adalah bagian dalam struktur corporate governance. Komite manajemen risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi perusahaan (Selfiani & Erina, 2024). Secara umum area tugas dan wewenang risk *management committee* adalah untuk mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi, menilai operasi manajemen risiko organisasi, evaluasi laporan keuangan organisasi, pastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktiknya (Alfikih & Widiyati, 2025). Perusahaan akan selalu berhadapan dengan risiko yang akan menghambat aktivitasnya, sehingga keberadaan komite manajemen risiko dianggap lebih fokus untuk mengendalikan risiko yang ada (Lahfah & Rahayu, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ayuningtyas & Harymawan (2022) menunjukkan bahwa keberadaan komite manajemen risiko (*risk management committee*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Keberadaan komite manajemen risiko ini di yakini dapat meningkatkan transparansi informasi dan efektivitas pengawasan risiko yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (Damayanti & Sitorus, 2024). Penelitian ini sejalan yang dilakukan Diah & Suwarno (2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan yang dilakukan (Falendro et al., 2020) yang menyatakan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko karena fungsi komite sering kali hanya bersifat formalitas dan belum dijalankan secara optimal.

Jumlah dewan komisaris merupakan jajaran dewan komisaris yang bertindak sebagai badan pengawas yang memantau kinerja manajemen dan memberi saran bagi manajemen perusahaan terkait dengan fungsinya untuk mengelola perusahaan atas nama kepentingan pemegang saham (Oktaviana & Puspitasari, 2022). Jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan ukuran dewan, baik independen maupun non-independen. Semakin banyak anggotanya, semakin kuat pengawasan dan aliran informasi, sehingga kualitas pengungkapan manajemen risiko meningkat (Nurbaiti & Pratiwi, 2023). Dewan komisaris perusahaan perlu terbebas akan permasalahan dampak, kepentingan, serta tekanan pada pihak lainnya supaya bisa mengambil putusan dengan cara yang objektif, dewan

komisaris sendiri tidak bisa ikut di dalam pengambilan putusan operasional (Anggraeni & Iradianty, 2022).

Hasil penelitian Cahyono (2023) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko. Artinya, setiap peningkatan ukuran dewan komisaris justru menurunkan adanya pengungkapan risiko, begitu juga sebaliknya. Namun, penelitian yang dilakukan Ikhsan et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2022) yang menunjukkan hasil variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal tersebut karena dewan komisaris memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan termasuk memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga terhindar dari kecurangan laporan keuangan (Krisna & Wijaya, 2022)

Frekuensi rapat dewan merupakan rapat merupakan akvitas para dewan akan melaksanakann tanggung jawab dan fungsinya atas perbankan. Remunerasi adalah imbalan yang diterima ketika para dewan telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya (Najah & Mukhibad, 2022). Frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif pengawas dalam pengambilan keputusan strategis, yang berpotensi meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien untuk pengambilan keputusan yang jauh lebih optimal (Natalia & Sihono, 2024). Dewan komisaris berkewajiban untuk mengadakan rapat minimal satu kali dalam dua bulan. Selain itu, dewan komisaris wajib mengadakan

rapat bersama dewan direksi minimal satu kali dalam empat bulan. Rapat tersebut dilaksanakan untuk mendiskusikan dan memantau agar tujuan dan kinerja perusahaan tercapai (Milenia & Syafei, 2021).

Hasil penelitian Dosinta (2024) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan. Semakin sering dewan melakukan rapat, semakin tinggi koordinasi dan pengawasan terhadap manajemen risiko, sehingga mendorong keterbukaan informasi risiko kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad & Narullia (2021) bahwa frekuensi rapat dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko bisnis perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan temuan Solikhah et al. (2023) frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini mengharuskan dewan komisaris untuk mengadakan rapat secara berkala guna mengevaluasi dan membahas hal penting terkait kinerja perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepemilikan publik merupakan adalah tanggung jawab yang di dapatkan oleh masyarakat dari pembelian surat utang yang di perjual belikan oleh perusahaan. Struktur kepemilikan publik ini akan melakukan berbagai macam cara agar mendapatkan keuntungan dan memberikan *return* kepada para *investor* dalam bentuk keuntungan investasi atau di sebut dengan *dividen* (Yusrawati et al., 2023). Kepemilikan publik merepresentasikan proporsi saham perusahaan yang dimiliki masyarakat. Proporsi kepemilikan masyarakat yang tinggi dalam suatu perusahaan akan menunjukkan skala pengawasan perusahaan dalam masyarakat

juga lebih tinggi dibanding perusahaan lain (Ramadhani et al., 2022). Perbedaan proporsi saham yang dimiliki investor luar atau pemegang saham publik dapat memengaruhi kelengkapan pengungkapan perusahaan. Semakin besar kepemilikan publik, semakin banyak informasi yang diungkapkan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Swarte et al., 2020).

Hasil penelitian Erviando et al. (2021) menunjukkan bahwa secara kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini jika saham lebih banyak dipegang oleh kepemilikan eksternal maka pihak perusahaan diuntut untuk memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap investor. Namun, penelitian yang dilakukan Aritonang (2022) menunjukkan kepemilikan saham publik secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh pihak luar, semakin banyak pula pengungkapan informasi yang harus diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham sehingga pemegang saham publik dapat memengaruhi kelengkapan pengungkapan (Muslih & Damayanti, 2025).

Leverage merupakan kemampuan suatu entitas untuk melunasi utangnya, baik utang lancar maupun utang jangka panjang. Adapun rasio *leverage* dapat di definisikan sebagai rasio yang di gunakan untuk menilai sejauh mana suatu entitas di biyai dengan utang (Kurniawan & Samhaji, 2020). Tingginya tingkat utang menunjukkan potensi risiko bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa depan. Karena itu, perusahaan dengan leverage tinggi perlu mengungkapkan bagaimana mereka memitigasi dan mempersiapkan diri terhadap

risiko tersebut (Nustini & Nuraini, 2022). Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, juga dapat menjelaskan hubungan antara total aset dan saham biasa, atau menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan menggunakan modal (Setiowati et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan Hanny & Susanto (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan informasi mengenai risiko yang di hadapi tidak di pengaruhi oleh penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Namun, penelitian Robby et al. (2021) menemukan bahwa *leverage* secara berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar kebutuhan untuk mengungkapkan risiko secara lebih lengkap. Pengungkapan yang lebih luas diperlukan perusahaan dapat menunjukkan kesiapan menghadapi potensi risiko terkait utang tersebut (Istiqomah et al., 2024)

Ukuran perusahaan merupakan suatu petunjuk atau indikator yang memberikan informasi tentang besar atau kecilnya perusahaan. Semakin kecil ukuran perusahaan, semakin rendah kestabilan keuangannya; sebaliknya, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil (Tanjung, 2020). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Abdullah, 2021). Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu dan

lebih stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Anggara et al., 2023). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai ke dalam tahap dewasa (Abdullah, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan Adnyana & Adwishanti (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin luas pula informasi risiko yang diungkapkan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Putra et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan justru tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menentukan keterbukaan informasi risiko, karena pengungkapan lebih dipengaruhi faktor internal seperti efektivitas dewan komisaris dan strategi manajemen risiko (Sari et al., 2021).

Dengan adanya perbedaan temuan penelitian terdahulu serta pentingnya pengungkapan risiko dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperjelas faktor-faktor tata kelola perusahaan dan atribut perusahaan yang memengaruhi tingkat pengungkapan risiko. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan bagi pihak manajemen, regulator, dan *investor* dalam memahami sejauh mana mekanisme tata kelola dan karakteristik perusahaan dapat mendorong peningkatan kualitas pengungkapan risiko pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk

mengangkat judul penelitian **"Pengaruh Tata kelola Dan Atribut Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024).**

1.1 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya tingkat pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia.
2. Pengungkapan risiko perusahaan masih bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi, belum sepenuhnya mencerminkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan.
4. Adanya pengaruh tata kelola (yang diproksikan oleh komite manajemen risiko, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kepemilikan publik) dan atribut perusahaan (yang diproksikan oleh *leverage* dan ukuran perusahaan) terhadap pengungkapan risiko.

1.2 Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka ditetapkan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali sektor perbankan dan pertambangan periode 2020–2024.
2. Variabel independen meliputi: komite manajemen risiko, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan, kepemilikan publik, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

3. Variabel dependen adalah pengungkapan risiko perusahaan yang diukur berdasarkan indeks pengungkapan risiko.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah frekuensi rapat dewan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini untuk mengetahui tata kelola dan atribut perusahaan terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024 berdasarkan penelitian sebelumnya yang memiliki hasil penelitian yang berbeda.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh komite manajemen risiko terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat dewan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan risiko perusahaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang *corporate governance* dan pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat bukti empiris terkait hubungan antara mekanisme tata kelola dan atribut perusahaan terhadap transparansi pelaporan risiko.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan penerapan tata kelola yang baik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam meningkatkan kualitas pelaporan risiko agar mampu membangun kepercayaan investor dan mengurangi asimetri informasi.

b. Bagi Investor dan pemangku kepentingan

Penelitian ini memberikan informasi tambahan yang berguna dalam menilai tingkat keterbukaan perusahaan terkait risiko yang dihadapi. Sehingga, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan kualitas pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan.

c. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam pengembangan penelitian serupa dengan variabel dan periode yang berbeda